

Gatot Nurmantyo

Tantang KSAD Instruksikan Pemutaran Film G30S/PKI

Reporter: **Budiarti Utami Putri**

Editor: **Rina Widiastuti**

Jumat, 21 September 2018 08:29 WIB



Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo (tengah) memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 8 Mei 2018. TEMPO/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo menantang Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Mulyono untuk menggelar nonton bareng film Penumpasan Pengkhianatan [G30S/PKI](#). Namun, tantangan ini lebih banyak dia tuju kepada KSAD Mulyono.

Baca: [TNI AD Gelar Nonton Bareng Film Pengkhianatan G30S/PKI](#)

Gatot menyebut KSAD sebagai penakut seumpama tak berani mengintruksikan pemutaran kembali film besutan sutradara Arifin C Noer itu. Dia juga mempertanyakan bagaimana KSAD mau memimpin prajurit pemberani seperti Komando Strategis Angkatan Darat, Komando Pasukan Khusus, prajurit TNI AD jika tak berani memerintahkan nobar tersebut.

"Kok KSAD-nya penakut, ya sudah pantas lepas pangkat," kata Gatot melalui akun Twitternya, @Nurmantyo_Gatot pada Kamis, 20 September 2018. Saat dikonfirmasi melalui pesan, Gatot mempersilakan cuitannya itu untuk dikutip.



Cuitan Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo. twitter.com

Gatot melanjutkan tantangannya kepada juniornya di matra darat itu. Dia mengatakan tak akan ada hukuman mati bagi KSAD seumpama mengeluarkan instruksi nobar itu. Menurut Gatot, hukuman terberat yang mungkin ditimpakan atas instruksi itu adalah copot jabatan, bukan copot nyawa atau hukuman mati. Gatot pun mempersilakan KSAD untuk pulang ke kampung halaman saja jika merasa takut mengeluarkan perintah tersebut.

Baca: [6 Fakta Tentang Film G 30 S PKI yang Wajib Diketahui](#)

"Kalau takut, pulang kampung saja. Karena kasihan nanti prajuritnya disamakan dengan pemimpin takut," ujarnya.

Menurut dia, sikap KSAD itu bisa menjatuhkan citra dan harga diri prajurit TNI AD yang terkenal pemberani dan super nekat. Di akhir cuitanya, Gatot menyampaikan keyakinannya bahwa KSAD bukan seorang penakut.

"Tapi saya yakin KSAD dan Panglima TNI bukan tipe penakut. Kita lihat saja pelaksanaannya," kata dia.

Di masa-masa akhir jabatannya sebagai panglima, Gatot memang menginstruksikan film itu diputar ulang dan ditonton oleh jaringan TNI di seluruh daerah pada 30 September 2017. Instruksi itu menuai kontroversi. Kalangan pegiat HAM menentang sebab menilai film G30S itu merupakan narasi sejarah versi Orde Baru yang mengglorifikasi militer

dan menyudutkan orang-orang yang dituduh anggota atau berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia.

Baca juga: [Tiga Tokoh di Balik Penghentian Pemutaran Film G 30 S PKI](#)

Di sisi lain, aparat negara kerap melarang pemutaran film-film yang menampilkan narasi lain dari peristiwa 30 September 1965 silam. Semisal pemutaran film "Jagal" yang berangkat dari sudut pandang seseorang yang ditugasi membunuh orang-orang yang dianggap PKI. Atau film "Senyap" yang menarasikan pengalaman seorang penyintas yang anggota keluarganya dibunuh lantaran dituduh PKI.

"Kalau pemerintah hanya mau nonton film ini (G30S), berarti pemerintah hanya mau masyarakat menonton film ini. Jangan kemudian melarang versi lain, itu kan ambigu," kata Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani di Jakarta, Rabu, 20 September 2017.

Tiga Tokoh di Balik

Penghentian Pemutaran Film G 30 S PKI

Oleh : **Tempo.co**

Senin, 18 September 2017 07:56 WIB



Arifin C Noor (kedua dari kiri) saat syuting film G30S/PKI di Jakarta, 1984.

Dok. TEMPO/Maman Samanhudi

TEMPO.CO, Jakarta - Film Pengkhianatan [G 30 S PKI](#) diputar sejak 1984 dan pernah mencapai box office setahun sesudahnya. Sejak itu, film yang diproduksi Nugroho Notosusanto, Menteri Pendidikan era Presiden Soeharto itu menjadi tontonan wajib tiap tanggal 30 September dan disiarkan ulang oleh TVRI hingga 1998. Per tanggal 24 September 1998, film itu tak diputar ulang karena sejumlah alasan.

Setidaknya ada tiga tokoh sentral yang berperan dalam dihentikannya pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI. Mereka adalah **Marsekal Udara Saleh Basarah, Menteri Penerangan Yunus Yosfiah, dan Menteri Pendidikan Juwono Sudarsono.**

BACA: [6 Fakta Tentang Film G 30 S PKI yang Wajib Diketahui](#)

Mantan Menteri Pendidikan Juwono Sudarsono saat itu mengatakan, ia pernah ditelepon Saleh Basarah sekitar bulan Juni-Juli 1998. "Beliau keberatan karena film itu mengulang-ulang keterlibatan perwira AURI pada peristiwa itu (30 September)," kata Juwono kepada Tempo ketika diwawancarai 28 September 2012.

Juwono menjabat sebagai menteri pendidikan sejak 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Sebagai menteri pendidikan kala itu, Juwono meminta kepada para ahli sejarah untuk meninjau kembali kurikulum pelajaran sejarah tingkat SMP dan SMA, khususnya yang memuat peristiwa-peristiwa penting. "Saya ingin informasi yang diterima siswa lebih berimbang," ujarnya.

BACA: [Kata Dosen UGM Soal Pemutaran Film G 30S PKI](#)

Juwono mencontohkan, pada peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, misalnya, tidak melulu menonjolkan peran Letnan Kolonel Soeharto yang ketika itu menjabat sebagai Komandan Wehkreise II, namun juga membeberkan perjuangan Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Sementara Marsekal Udara Saleh Basarah adalah tokoh yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada tahun 1973-1977. Kendati hanya berbicara per telepon dan tidak membuat surat resmi untuk menghentikan pemutaran film G30S itu, sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asvi Warman Adam, mengatakan pandangan Saleh patut didengar. "Karena ia orang yang disegani," ujarnya.

Saleh yang pernah menjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Inggris Raya itu meninggal dunia pada 11 Februari 2010.

BACA: [Direktur PFN Akui Film G 30 S PKI Dibuat Sesuai Selera Orde Baru](#)

Ada pun Menteri Penerangan saat itu Yunus Yosfiah, mengatakan, pemutaran film yang bernuansa pengkultusan tokoh, seperti film Pengkhianatan [G 30 S PKI](#) Janur Kuning, dan Serangan Fajar tidak sesuai lagi dengan dinamika Reformasi. "Karena itu, tanggal 30 September mendatang, TVRI dan TV swasta tidak akan menayangkan lagi film

Pengkhianatan G30S/PKI," ujar Yunus seperti dikutip dari Kompas edisi 24 September 1998.

Sebagai gantinya, lanjut Yunus, Departemen Penerangan bekerja sama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mempersiapkan sebuah film yang terdiri dari tiga episode. Film berjudul Bukan Sekadar Kenangan itu disutradarai Tatiek Mulyati Sihombing.

WDA | Pusat Data Analisa Tempo (PDAT)

Kata Dosen UGM Soal Pemutaran Film G 30S PKI

Oleh : Tempo.co

Senin, 18 September 2017 04:46 WIB



Film Pengkhianatan G 30 S-PKI

TEMPO.CO, Yogyakarta- Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada Budi Irawanto menganggap pemutaran kembali Film Penumpasan Pengkhianatan [G 30S PKI](#) seperti pada era Orde Baru sebagai kemunduran.

Budi menyebut di tengah dunia yang semakin terbuka dan banyak sumber informasi tentang peristiwa 1965, orang gampang mengakses beragam platform media. "Instruksi pemutaran film itu mengulang kembali ritual yang lazim dijalankan era Orba setiap 30 September," kata dia saat dihubungi, Ahad, 17 September 2017.

Baca juga: [TNI Ajak Tonton Film G 30S PKI, PBNU: Tak Cocok Diputar Sekarang](#)

Ada dua hal yang hendak dicapai dalam pemutaran film itu. Pertama, mengingatkan orang ihwal kekejaman Partai Komunis Indonesia yang terus menjadi ancaman abadi bagi Bangsa Indonesia. Kedua, film itu ingin menunjukkan militer termasuk keluarga mereka menjadi korban kekejaman PKI. "Iklim kewaspadaan diciptakan terhadap bahaya PKI dan mengukuhkan pendekatan keamanan. Militer menjadi ujung tombaknya," kata Budi.

TNI AD menginstruksikan kepada seluruh jajarannya di daerah untuk mengajak masyarakat menonton bersama film Pengkhianatan G 30 S PKI. Kepala Pusat Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal Wuryanto membenarkan informasi tersebut, Jumat, 15 September 2017.

BACA: [Cerita Pemeran Soeharto dan Adegan Berdarah di Film G 30 S PKI](#)

Film besutan Sutradara Arifin C.Noer itu menampilkan banyak adegan kekerasan di stasiun televisi nasional. Film berdurasi sekitar 220 menit itu menggambarkan penyiksaan para jenderal, tawa puas para penyiksa, dan pengambilan mayat korban tragedi pada September, 52 tahun lalu.

Presiden Soeharto memerintahkan *TVRI* menayangkan film itu setiap 30 September. Murid-murid sekolah diwajibkan menonton film propaganda tentang pemberontakan PKI versi Soeharto atau Orde Baru.

Ketika reformasi bergulir pada September 1998, Menteri Penerangan Yunus Yosfiah mengumumkan film Penumpasan Pengkhianatan [G 30S PKI](#) yang diproduksi tahun 1984 ini tidak diputar atau diedarkan lagi. Begitu juga film *Janur Kuning* (1979) dan *Serangan Fajar* (1981). Alasannya, berbau rekayasa sejarah dan mengkultuskan seorang presiden.

SHINTA MAHARANI